

Analisis Pengaruh Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan dan Kemandirian Keuangan Terhadap *Financial Distress* Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Siti Nur Khoirunnisa¹, Nelly Masnila², Anggeraini Oktarida³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, sitinurkhoirunnisa02@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, nellymasnila@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya guna menganalisis pengaruh Solvabilitas, Derajat Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, dan Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress* pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Financial Distress* merujuk pada kondisi di mana pemerintah daerah gagal menyediakan layanan publik yang memadai akibat keterbatasan anggaran, yang diidentifikasi melalui rasio belanja modal yang kurang dari 30%. Data yang dipergunakan berasal dari LKPD tahun 2019–2023 yang diperoleh dari website BPK RI dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26. Temuan mengindikasikan keempat variabel independen tersebut berdampak signifikan atas *Financial Distress*, baik secara parsial maupun simultan. Solvabilitas dan Derajat Desentralisasi berdampak positif, yang berarti peningkatan keduanya dapat memperbesar risiko *Financial Distress* apabila tidak disertai dengan pengelolaan anggaran yang efisien. Sebaliknya, Kinerja Keuangan dan Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa perbaikan pada kedua aspek tersebut mampu menurunkan risiko *Financial Distress*. Temuan ini menegaskan *Financial Distress* merupakan permasalahan yang kompleks serta memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang menyeluruh untuk menjamin keberlanjutan layanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci: : Financial Distress, Solvabilitas, Desentralisasi, Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan.

ABSTRACT

This study examines the influence of Solvency, Degree of Fiscal Decentralization, Financial Performance, and Financial Independence on Financial Distress in 17 regencies and cities within South Sumatra Province. Financial distress refers to the inability to provide quality public services due to budget limitations, measured by a capital expenditure ratio of less than 30%. The study utilizes LKPD data from 2019–2023 obtained from the Audit Board of Indonesia (BPK RI) website and were analyzed employing multiple linear regression techniques with the aid of SPSS 26. The findings indicate that all of four variables significantly affect financial distress, both partially and simultaneously. Solvency and Fiscal Decentralization have a positive effect, suggesting that increases in these factors heighten the risk of financial distress in the absence of efficient budget management. Meanwhile, Financial Performance and Financial Independence show a negative effect, indicating that improvements in these areas reduce the risk of financial distress. These findings highlight that financial distress is a multifaceted issue that requires comprehensive local financial management to maintain the sustainability of high-quality public services.

Keywords : *Financial Distress, Solvency, Decentralization, Financial Performance, Financial Independence.*

A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1999 melalui UU No. 23/2014, Indonesia memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah guna mengelola urusan lokal, termasuk keuangan, guna meningkatkan efisiensi dan



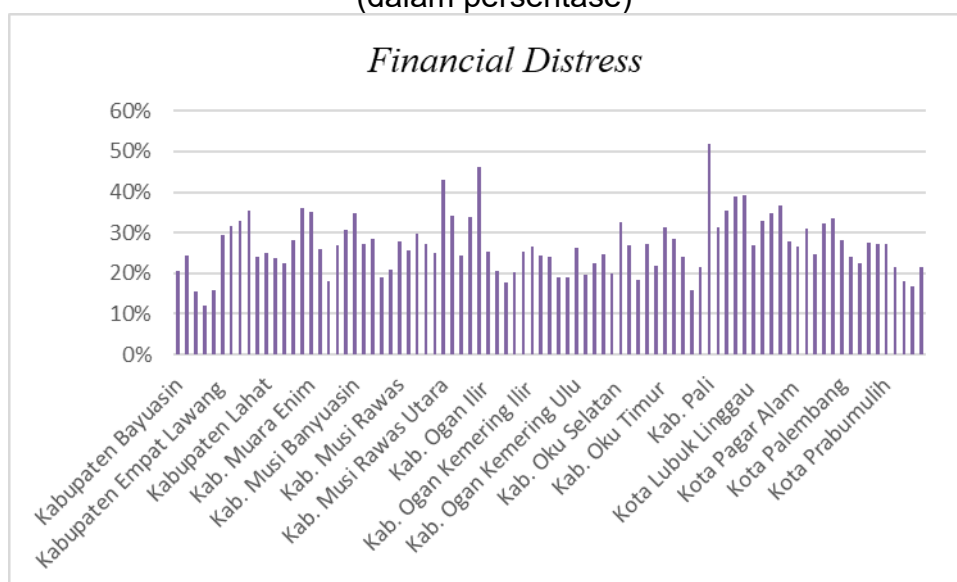
pelayanan publik sesuai Pancasila dan UUD 1945. Namun, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang efektif.

Financial distress adalah kondisi saat pemerintah daerah tidak mampu membiayai operasional, membayar utang, atau membangun infrastruktur, akibat keterbatasan sumber daya, manajemen lemah, atau krisis ekonomi (Wulandari & Arza, 2020; Kristanti, 2019). Dampaknya bisa mengarah pada likuidasi jika keuangan dan SDM habis. Indikator utamanya adalah belanja modal di bawah 30%, menandakan lemahnya investasi publik (Ditjen Bina Keuangan Daerah; Pradana & Sarjiyanto, 2023).

Adanya beberapa daerah di Sumatera Selatan mengalami financial distress, terlihat dari penundaan gaji dan proyek mangkrak (Kompas, 2023) dipicu oleh kapasitas fiskal rendah dan ketergantungan pada DAU. Meski memiliki potensi ekonomi besar, kesenjangan fiskal antardaerah masih tinggi, dan kemandirian keuangan rendah. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan efisiensi anggaran sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Gambar Grafik Financial Distress

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(dalam persentase)



Sumber : www.bpk.go.id Data diolah peneliti (2025)

Pada tahun 2023, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami *financial distress* karena rasio belanja modal di bawah 30%, termasuk Banyuasin (16%), Empat Lawang (24%), Musi Banyuasin (21%), Musi Rawas (25%), Ogan Ilir (25%), OKI (19%), OKU (20%), OKU Selatan (22%), OKU Timur (21%), Lubuk Linggau (28%), Palembang (27%), dan Prabumulih (22%). Kondisi ini mencerminkan rendahnya investasi infrastruktur yang berdampak pada kualitas layanan publik (Sari & Arza, 2019).

Solvabilitas menjadi indikator penting dalam menilai potensi *financial distress*. Tingginya proporsi utang terhadap aset menurunkan kapasitas belanja modal dan meningkatkan risiko kesulitan keuangan (Mahmudi, 2019; Sari & Arza, 2019). Derjat desentralisasi, yang mencerminkan dari kontribusi PAD, menunjukkan Tingkat kemandirian fiskal daerah. Daerah dengan PAD tinggi dapat efektif menjalankan

otonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syahputra, 2017). Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan serta pengeluaran demi mewujudkan target pembangunan (Sari, 2020). Kemandirian keuangan menunjukkan sejauh mana PAD dapat membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Semakin tinggi kemandirian, semakin besar peluang peningkatan belanja modal dan pelayanan publik, serta semakin rendah risiko *financial distress* (Pranoto et al., 2022; Ilahi et al., 2021).

B. KAJIAN TEORI

Agency Theory

Teori agensi menjelaskan relasi antara prinsipal serta agen, di mana agen diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal (Lasmono & Siregar, 2021). Menurut Jensen serta Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016), Dasar teori utama dalam penelitian ini adalah teori agensi, yang menggambarkan korelasi antara masyarakat serta pemerintah sebagai suatu relasi keagenan. Pada konteks ini, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kontrak kepada pemerintah sebagai agen, dengan tujuan agar pemerintah menyediakan layanan yang memenuhi kepentingan masyarakat.

Solvabilitas

Solvabilitas mencerminkan kompetensi entitas dalam melunasi seluruh utangnya. Entitas disebut *solvable* jika mampu memenuhi kewajiban finansialnya, dan *insolvable* jika sebaliknya (Dewi & Utama, 2022 dalam Fatmawati et al., 2023). Pada pemerintah daerah, rasio solvabilitas dipergunakan untuk mengevaluasi kapasitas menunaikan kewajiban jangka pendek serta panjang dengan membandingkan total aktiva terhadap total utang.

Derajat Desentralisasi

Berdasarkan UU No. 32/2004, derajat desentralisasi ialah wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom guna mengelola bidang pemerintahan. Dalam konteks fiskal, ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran daerah. Rasio derajat desentralisasi mengukur kontribusi PAD atas total pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi akan meningkat seiring dengan bertambahnya PAD (Mahmudi, 2016 dalam Illahi et al., 2021).

Kinerja Keuangan

Menurut Permendagri No. 13/2006, kinerja ialah hasil kegiatan yang diraih dengan pemanfaatan anggaran secara terukur. UU No. 32/2004 menyebut kinerja keuangan sebagai hak dan kewajiban daerah terkait pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kinerja keuangan mencerminkan capaian penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada kajian ini, kinerja keuangan dievaluasi dengan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara belanja operasional dan pendapatan yang diperoleh.

Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merujuk pada kapabilitas pemerintah daerah guna membiayai operasional pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik mempergunakan sumber pendapatan internal, terutama dari pajak serta retribusi (Halim Pramono, 2014). Indikator ini menunjukkan sejauh mana PAD mampu menutupi kebutuhan daerah. Pada kajian ini, kemandirian diukur dengan



membandingkan PAD atas total belanja daerah (Ritonga, 2014 dalam Sari & Arza, 2019). Daerah yang mandiri dapat mengelola keuangan sendiri tanpa ketergantungan penuh pada pusat, serta lebih leluasa mengalokasikan dana sesuai kepentingan masyarakat

Financial Distress

Financial distress pada pemerintahan adalah ketidakmampuan menyediakan layanan publik sesuai standar. Salah satu indikatornya adalah belanja modal di bawah 30% dari total belanja daerah (Karunia, 2016). Ritonga (2014) dalam Apriandi (2013) menyebut kondisi keuangan mencerminkan kapasitas daerah memenuhi kewajiban secara efisien. Henshaw (2022) menambahkan bahwa financial distress ditandai dengan anggaran defisit, arus kas terganggu, dan ketidakmampuan membayar beban. Pada kajian ini, pengukurannya mempergunakan rasio belanja modal atas total belanja daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik atas data numerik, sesuai prinsip ilmiah (Sugiyono, 2023:16). Objek penelitian mencakup 17 pemerintah daerah di Sumatera Selatan dengan data LKPD tahun 2019–2023 dari situs resmi BPK RI. Teknik pengambilan sampel mempergunakan sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya terbatas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dipergunakan untuk mendeskripsikan statistik variabel independen dan dependen, seperti nilai mean, minimum, maksimum, sum, dan standar deviasi. Uji deskriptif dilaksanakan pada 85 sampel (N = 85), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Uji Deskriptif

Tabel Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Solvabilitas	85	,29	487,22	103,3755	110,70447
Derajat Desentralisasi	85	-,06	,33	,0867	,07091
Kinerja Keuangan	85	,70	4,80	,9798	,43228
Kemandirian Keuangan	85	-,18	,32	,0932	,09304
Financial Distress	85	,18	,40	,2685	,03736
Unstandardized Residual	85	-,00263	,00270	,0000000	,00060947
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2025

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2021), uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov Smirnov dipergunakan untuk menelaah apakah data regresi berdistribusi normal, dengan tingkat signifikansi 0,05. Bila signifikansi > 0,05, data normal; bila < 0,05, data tidak normal

Tabel Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00060947
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,080
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

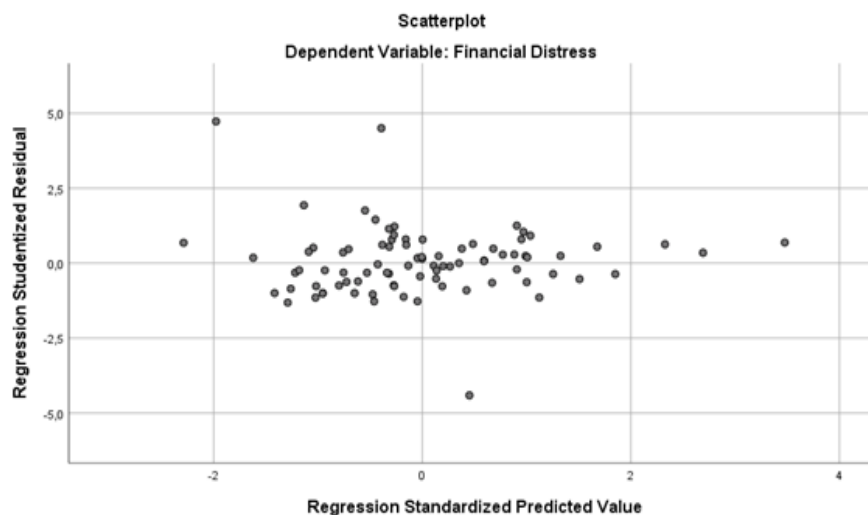
Sumber : Output data diolah dengan SPSS 26, 2025

Berlandaskan Tabel di atas, data dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) 0,200 > 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Diungkapkan Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan. Model yang baik menunjukkan homoskedastisitas. Jika titik pada grafik scatterplot ZPRED vs SRESID tersebar acak tanpa pola di sekitar sumbu Y = 0, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output data diolah (SPSS 26), 2025

Berlandaskan output SPSS, titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak di atas serta di bawah sumbu Y = 0 tanpa pola tertentu, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.



Uji Autokorelasi

Diungkapkan Ghozali (2021), uji autokorelasi mendeteksi adanya korelasi antara error periode t dan t-1. Jika ada, berarti terjadi autokorelasi. Hasil pengujiannya disajikan pada Tabel Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	,999	,999	,00062	1,994

a. Predictors: (Constant), Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan

b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Output data diolah (SPSS 26), 2025

Temuan mengindikasikan nilai Durbin-Watson 1,994. Karena berada di antara DU dan 4-DU ($1,7470 < 1,994 < 2,253$), sehingga model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2021), regresi linear berganda dipergunakan untuk mengukur korelasi antara satu variabel dependen serta beberapa variabel independen. Pada studi ini, dipergunakan untuk menganalisis dampak Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan, serta Kemandirian Keuangan atas *Financial Distress*. Hasil analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,291	,000		1470,565	,000
	Solvabilitas	1,497E-6	,000	,004	2,423	,018
	Derajat Desentralisasi	,686	,003	1,301	261,846	,000
	Kinerja Keuangan	-,004	,000	-,051	-27,754	,000
	Kemandirian Keuangan	-,837	,002	-2,085	-419,709	,000

a. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Output data diolah (SPSS 26), 2025

Berlandaskan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda terbentuk sebagai berikut:

$$Y = 0,291 + 0,004 X_1 + 1,301 X_2 + (-0,051 X_3) + (-2,085X_4) + e$$

1. Konstanta (0,291): Jika semua variabel independen bernilai nol, maka *Financial Distress* sebesar 0,291.

2. Solvabilitas (0,004): Berpengaruh positif; kenaikan 1 satuan solvabilitas meningkatkan *Financial Distress* sebesar 0,004.
3. Derajat Desentralisasi (1,301): Berpengaruh positif; kenaikan 1 satuan meningkatkan *Financial Distress* sebesar 1,301.
4. Kinerja Keuangan (-0,051): Berpengaruh negatif; perbaikan kinerja menurunkan *Financial Distress* sebesar 0,051.
5. Kemandirian Keuangan (-2,085): Berpengaruh negatif; peningkatan kemandirian menurunkan *Financial Distress* sebesar 2,085

Uji t (Parsial)

Pengambilan keputusan dalam uji t membandingkan nilai t-tabel dengan t-hitung pada signifikansi 5% (uji dua sisi = 2,5%) dengan $df = n - k - 1 = 85 - 4 - 1 = 80$. Dengan signifikansi 0,025, diperoleh nilai t-tabel 1,99006. Table 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t).

Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,291	,000		1470,565	,000
	Solvabilitas	1,497E-6	,000	,004	2,423	,018
	Derajat Desentralisasi	,686	,003	1,301	261,846	,000
	Kinerja Keuangan	-,004	,000	-,051	-27,754	,000
	Kemandirian Keuangan	-,837	,002	-2,085	-419,709	,000

a. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Output data diolah SPSS 26, 2025

Temuan uji t mengindikasikan tiap variabel independen berdampak signifikan atas financial distress, dengan rincian:

1. Solvabilitas (X1) t-hitung 2,423 > t- tabel 1,99006 (H1) diterima (berpengaruh signifikan positif)
2. Derajat Desentralisasi (X2) t-hitung 261,846 > 1,99006 (H2) diterima (berpengaruh signifikan positif)
3. Kinerja Keuangan (X3) t-hitung - 27,754 > 1,99006 (H3) diterima (berpengaruh signifikan negatif)
4. Kemandirian Keuangan (X4) t-hitung - 479,709 > 1,99006 (H4) diterima (berpengaruh signifikan negatif)

Uji F

Uji ini mengkaji dampak simultan variabel independen atas dependen. Hipotesis diterima/ditolak berdasarkan nilai signifikansi (p-value) dengan $\alpha = 0,05$. Hasil uji F pada tabel :



Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,117	4	,029	75144,668	,000 ^b
	Residual	,000	80	,000		
	Total	,117	84			

a. Dependent Variable: Financial Distress

b. Predictors: (Constant), Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan

Sumber : Output data diolah (SPSS 26), 2025

Berlandaskan tabel, nilai Fhitung 75.144,668 > Ftabel 2,486 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga dinyatakan solvabilitas, derajat desentralisasi, kinerja keuangan, serta kemandirian keuangan secara simultan berdampak signifikan atas *financial distress*.

Koefisin Determinasi (R²)

Koefisien ini mengevaluasi kapabilitas variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam regresi berganda, *Adjusted R²* lebih akurat daripada *R²*. Hasilnya ditampilkan pada Tabel.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	,999	,999	,00062	1,994

a. Predictors: (Constant), Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan

b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 26, 2025

Berlandaskan tabel, nilai Adjusted R Square 0,99 berarti 99% variasi *financial distress* dijelaskan oleh variabel solvabilitas, derajat desentralisasi, kinerja keuangan, dan kemandirian keuangan, sedangkan 1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Solvabilitas terhadap Financia Distress

Hipotesis pertama mengindikasikan solvabilitas berdampak positif atas financial distress. Hasil uji parsial menunjukkan t-hitung 2,423 > t-tabel 1,99006 dan signifikansi 0,018 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin tinggi solvabilitas, semakin besar risiko financial distress. Hal ini disebabkan oleh rendahnya alokasi belanja modal (di bawah 30%), yang mencerminkan penggunaan utang yang kurang produktif.

Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah sebagai agen tidak selalu mengelola sumber daya secara optimal sesuai kepentingan masyarakat. Meskipun daerah mampu membayar utang, risiko *financia distress* tetap muncul jika anggaran tidak dialokasikan untuk belanja produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yevi

et al. (2024) serta Sari & Arza (2019), yang menunjukkan bahwa proporsi utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko *financial distress* tergantung pada konteks penggunaannya.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap *Financial Distress*

Hipotesis kedua mengindikasikan derajat desentralisasi berdampak positif signifikan atas *financial distress*, dengan t-hitung $261,846 > t\text{-tabel } 1,99006$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, peningkatan PAD dapat meningkatkan risiko *financial distress* jika tidak diiringi tata kelola keuangan yang baik. Hubungan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, meskipun memberi keleluasaan bagi daerah, dapat menimbulkan tekanan fiskal apabila tidak didukung kapasitas manajerial yang memadai. Temuan ini selaras dengan Eliza et al. (2024), yang menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi bergantung pada pengelolaan keuangan yang efisien dan konteks fiskal masing-masing daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Financial Distress*

Hipotesis ketiga mengindikasikan kinerja keuangan berdampak negatif signifikan atas *financial distress*. Temuan uji memperlihatkan t-hitung $-27,754 > t\text{-tabel } 1,99006$ (secara absolut) serta signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin baik kinerja keuangan, semakin rendah risiko *financial distress*. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang mampu mencegah tekanan fiskal. Temuan ini didukung oleh Mariasmo (2018), Sari & Rahma (2021), serta Lailiyah & Desitama (2024), yang menyatakan bahwa alokasi anggaran yang tepat dan belanja modal yang produktif dapat menurunkan potensi *financial distress* di daerah.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Hipotesis keempat mengindikasikan kemandirian keuangan berdampak negatif signifikan atas *financial distress*, dengan t-hitung $-479,709 > t\text{-tabel } 1,99006$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi kemandirian keuangan, semakin rendah risiko *financial distress*. Daerah yang mandiri secara fiskal mampu memenuhi kebutuhan keuangan tanpa bergantung pada transfer pusat. Temuan ini didukung oleh Halim (2014), Wibowo (2022), dan Ilahi et al. (2021), yang menekankan pentingnya PAD dan pengelolaan fiskal yang efisien untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Pengaruh Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan dan Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan Tabel uji F, diperoleh $F\text{ hitung } 75.144,668 > F\text{table } 2,486$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga Solvabilitas, Derajat Desentralisasi, Kinerja Keuangan, dan Kemandirian Keuangan secara simultan berdampak signifikan atas *financial distress*. Ini mengindikasikan *financial distress* dipengaruhi oleh kombinasi faktor keuangan serta tata kelola daerah. Temuan ini sejalan dengan Lailiyah & Desitama (2024) serta Wulandari & Arza (2020), yang menegaskan bahwa *financial distress* merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan menyeluruh, mencakup perbaikan di seluruh aspek keuangan dan tata kelola.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan temuan penelitian, dapat disimpulkan:



1. Solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*; semakin tinggi solvabilitas tanpa pengelolaan anggaran yang baik, semakin besar risiko kesulitan keuangan.
2. Derajat desentralisasi juga berpengaruh positif signifikan; otonomi fiskal yang tidak diimbangi dengan kapasitas tata kelola dapat meningkatkan risiko *financial distress*.
3. Kinerja keuangan dan kemandirian keuangan berpengaruh negatif signifikan; daerah dengan efisiensi dan kemandirian yang baik lebih mampu menekan risiko *financial distress*.
4. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, menunjukkan pentingnya tata kelola dan kebijakan keuangan yang terpadu di tingkat daerah.

Saran

1. Peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian fiskal penting untuk menciptakan keuangan daerah yang sehat melalui optimalisasi PAD dan diversifikasi pendapatan.
2. Peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian fiskal penting untuk menciptakan keuangan daerah yang sehat melalui optimalisasi PAD dan diversifikasi pendapatan.
3. Pemerintah pusat dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar evaluasi kebijakan transfer dan pengawasan desentralisasi fiskal.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti tata kelola, transparansi, dan partisipasi publik serta memperpanjang periode data agar hasil lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I. K., & Utama, A. G. S. (2022). *Solvabilitas Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Fiskal*. Dalam Fatmawati, A. et al. (2023). *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(2), 75–83.
- Eliza, N., Pratama, F., & Handayani, D. (2024). *Desentralisasi Fiskal dan Financial Distress: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan*, 18(1), 45–56.
- Fatmawati, A., Susanto, H., & Dewi, I. K. (2023). *Solvabilitas Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Fiskal*. *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(2), 75–83.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (9 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ilahi, M. A., Wibowo, D. R., & Suryani, T. (2021). *Kemandirian Fiskal dan Ketahanan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(3), 123–135.
- Karunia, N. (2016). *Financial Distress Pemerintah Daerah: Sebuah Kajian Awal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 91–102.
- Kristanti, T. (2019). *Analisis Tingkat Financial Distress pada Pemerintah Daerah*. *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 48–56.
- Lailiyah, N., & Desitama, R. (2024). *Efektivitas Belanja Modal dalam Menekan Financial Distress Daerah*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 11(1), 33–41.
- Lasmono, A., & Siregar, R. (2021). *Agency Theory dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 100–110.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mariasmo. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 14–23.
- Pranoto, B., Rahayu, F., & Arifah, L. (2022). *Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Solusi Krisis Fiskal*. *Jurnal Fiskal dan Kebijakan Daerah*, 5(1), 21–31.
- Ritonga, I. T. (2014). *Indikator Keuangan dalam Mengukur Financial Distress Pemerintah Daerah*. *Jurnal Anggaran dan Keuangan*, 4(3), 55–65.
- Sari, D. K. (2020). *Kinerja Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Daerah*, 9(2), 61–70.
- Sari, D. K., & Arza, F. (2019). *Utang Daerah dan Risiko Financial Distress: Studi Empiris di Sumatera Selatan*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 7(1), 85–96.
- Sari, N., & Rahma, Y. (2021). *Kinerja Fiskal dan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menekan Distress Keuangan*. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 29–40.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, I. (2017). *Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Regional*, 5(1), 37–46.
- Wibowo, T. (2022). *Pengaruh PAD terhadap Ketahanan Fiskal Pemerintah Daerah*. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(3), 118–125.
- Wulandari, R., & Arza, F. (2020). *Penyebab dan Dampak Financial Distress pada Pemerintah Daerah*. *Jurnal Tata Kelola dan Keuangan Daerah*, 11(2), 44–53.
- Zelmiyanti. (2016). *Penerapan Agency Theory dalam Hubungan Pemerintah dan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 77–85.

